



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PELUANG INVESTASI PROYEK INFRASTRUKTUR INDONESIA DALAM ICI 2025

**Rafika Sari**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rafika.sari@dpr.go.id](mailto:rafika.sari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi penting untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Dalam forum International Conference of Infrastructure (ICI) 2025 tanggal 11–12 Juni 2025 di Jakarta, Indonesia membuka peluang investasi untuk 9 proyek infrastruktur strategis nasional senilai ±Rp90 triliun. Kesembilan proyek tersebut meliputi bendungan, jalan tol, dan pengelolaan sampah (Tabel 1). Forum yang dihadiri oleh lebih dari 7.000 peserta dari 33 negara menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah dengan mitra potensial swasta dalam membangun infrastruktur nasional yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan mitra internasional mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur nasional tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

**Tabel 1.** Proyek Strategis Nasional yang Ditawarkan di ICI 2025

Proyek Strategis Nasional	Lokasi	Ket	Nilai Investasi	
			USD juta	Rp triliun
• PLTM Bendungan Way Sekampung	Lampung	5,4 MW	7,25	
• PLTM Bendungan Tapin	Kalimantan Selatan	2,7 MW	5,00	
• PLTM Bendungan Leuwikeris	Jawa Barat	7,4 MW	16,00	
• PLTM Bendungan Cipanas	Jawa Barat	3,0 MW	4,81	
• PLTM Bendungan Karalloe	Sulawesi Selatan	4,5 MW	7,94	
• Tol Gilimanuk–Mengwi	Bali	96,84 km		25,40
• Tol Pejagan–Cilacap	Jawa Tengah	95,39 km		27,59
• Tol Sentul Selatan–Karawang Barat	Jawa Barat	60,36 km		34,75
• TPA Sampah Terpadu Manggar	Kalimantan Timur		115,31	
<b>Total Investasi</b>			156,30*	87,74

*Keterangan:*  
\*asumsi 1US\$ Rp 16.000, maka nilai investasi US\$156,3 juta dikonversi menjadi Rp2,5 triliun, sehingga total investasi kesembilan proyek senilai ±Rp90 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) memilih 9 proyek tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Empat bendungan terpilih dari 34 bendungan yang layak untuk investasi karena memiliki kapasitas di atas 1 MW. Dari 259 bendungan yang selesai dibangun, hanya 73 bendungan yang dinilai memiliki potensi signifikan untuk pembangkit listrik tenaga air (*hydropower*) dan 34 diantaranya yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Tiga proyek jalan tol terpilih merupakan bagian proyek strategis nasional (PSN) yang melengkapi jaringan Tol Trans Jawa dan di Pulau Bali, serta pengembangan infrastruktur yang akan datang. Proyek tersebut memiliki prioritas tinggi dalam pembangunan nasional yang tentu menarik minat investor. Selanjutnya, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar di Kalimantan Timur terpilih karena akan diubah menjadi sumber energi berbasis sampah dengan menggunakan teknologi *incinerator* dan *landfill mining* dengan masa konsesi 23 tahun.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, bahwa pemerintah hanya mampu membiayai ±60% dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional selama periode

2025-2029 sebesar Rp1.905 triliun (US\$117 miliar). Kapasitas pembiayaan pemerintah infrastruktur sebesar Rp1.152 triliun, bersumber dari APBN sebesar Rp678,9 triliun (35,6%) dan APBD sebesar Rp473,3 triliun (24,8%). Namun, masih ada kesenjangan pendanaan (*funding gap*) sebesar Rp752,8 triliun ( $\pm 40\%$ ). Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat dijadikan solusi pembiayaan infrastruktur tanpa terlalu membebani anggaran negara dan memiliki potensi yang besar untuk digarap. Meskipun KPBU memiliki potensi, peran swasta untuk menutupi kesenjangan pendanaan infrastruktur belum optimal. Kondisi ini terlihat dari partisipasi swasta dalam proyek infrastruktur selama periode 2020-2024 sebesar Rp440,4 triliun (21%), sementara *funding gap* sebesar Rp724 triliun, di mana hanya terkumpul Rp1.774,38 triliun dari Rp2.058 triliun kebutuhan dana.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Donny Rahajoe, mengatakan bahwa investor merasa enggan dan trauma untuk berinvestasi dalam proyek pemerintah dengan skema KPBU. Beberapa penyebabnya antara lain kekhawatiran akan kepastian hukum, fragmentasi kebijakan, risiko yang tinggi, dan birokrasi yang berbelit dan panjang. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur.

## Atensi DPR

Pemerintah mengharapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi pembiayaan kreatif untuk mendukung infrastruktur periode 2025–2029 di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Komisi V DPR RI menekankan pentingnya memprioritaskan program-program infrastruktur yang berbasis masyarakat dan memastikan ketersediaan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah. Komisi V DPR RI perlu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum secara proaktif mengembangkan skema KPBU yang menarik bagi investor dengan dukungan regulasi terkait agar ada kepastian berusaha bagi swasta. Selain itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam mencari sumber pembiayaan alternatif. Untuk itu, Komisi V DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## Sumber

kompas.com, 15 April 2025, 4 & 13 Juni 2025;  
nasional.kontan.co.id, 15 Juni 2025;  
pu.go.id, 13 Juni 2025;  
tempo.co, 4 Juni 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Brigita Diaz Primadita  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making